

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan. Pada umumnya, pembangunan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut sebagaimana tujuan dari pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tumangkeng, 2018).

Permasalahan yang paling sering di alami oleh negara berkembang yaitu sesuatu yang berhubungan erat dengan masalah ketenagakerjaan, dimana Indonesia termasuk ke dalam negara dengan pertumbuhan jumlah populasi yang cukup cepat yang artinya mempunyai input tenaga kerja yang cukup besar dan tentunya dapat memunculkan berbagai masalah ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang sangat pesat (Purwasih & Soesatyo, 2017). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,77 juta orang. Jumlah tersebut naik 1,13% dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 272,68 juta orang. Jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) berjumlah 209,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 143,72 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63% dari jumlah penduduk usia kerja. Jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2021 jumlah angkatan kerja sudah bertambah 3,5 juta orang (2,55%), dan TPAK bertambah 0,83 poin persentase. Adanya peningkatan angkatan kerja yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja akan berdampak pada

peningkatan angka pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,86% (8,42 juta orang). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu menyerap tenaga kerja karena jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan tingkat penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila sudah tersedianya lapangan pekerjaan dan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada setiap sektor perekonomian. Perluasan penyerapan tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dalam usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja. Hal ini harus bisa dilakukan agar terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas hidup yang layak dengan memperluas lapangan pekerjaan. Karena dengan meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatkan beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Pembangunan di Indonesia pada umumnya dititik beratkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan menempatkan sektor industri sebagai sektor pemimpin dan sebagai penyedia lapangan kerja bagi penduduk untuk memenuhi pasar kerja (Gulo et al., 2022). Berkembangnya sektor industri di Indonesia ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, PDB sektor industri pengolahan di Indonesia pada tahun 2017-2022 berkontribusi rata-rata sebesar 21,6% terhadap total PDB Indonesia. PDB sektor industri pengolahan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 kontribusi PDB di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,3%. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB berperan sebagai penyumbang terbesar bagi PDB dengan

sumbangan sebesar Rp.2.396.603,00 miliar di tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sudah berupaya dalam proses industrialisasi yang ditunjukkan dari kontribusi sektor industri yang dominan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Menurunnya kontribusi sektor pertanian menunjukkan adanya perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri, dimana menurut Lewis perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi industri merupakan salah satu syarat dalam pembangunan ekonomi (Kurniawati et al., 2018). Sumbangan sektor industri yang paling dominan tersebut juga menunjukkan peran sektor industri sebagai *leading sector* yang dapat menggerakkan dan mengembangkan sektor-sektor lain untuk mempercepat pembangunan.

Peran sektor industri dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sangat penting khususnya sektor industri pengolahan yang dianggap sebagai sektor unggulan dan industri yang strategis. Pembangunan sektor industri pengolahan (*manufacturing industry*) hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang. Sektor industri dijadikan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian (Purnawati & Khoirudin, 2019). Industri ini dipandang mampu mendorong perekonomian Indonesia yang sedang berkembang. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang melimpah, maka sektor industri pengolahan diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Produk industri mempunyai nilai jual yang tinggi dari pada sektor lain, hal ini dikarenakan produk industri sangat beragam dan memberikan nilai dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Akan tetapi semakin besar peranan suatu sektor, maka akan memunculkan suatu tantangan mulai dari aspek keterbatasan sumber daya terutama ketersediaannya tenaga ahli yang terampil, sarana dan prasarana, investasi yang perlu di tingkatkan, kondisi keamanan dalam negeri, serta pemerataan dalam perkembangan industri yang menjadi tantangan dalam negeri.

Pulau Sumatera adalah pulau kedua setelah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu berjumlah 59.9 juta orang. Pulau Sumatera termasuk juga pulau yang memiliki jumlah angkatan kerja tinggi. Perluasan tenaga kerja di suatu wilayah diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang akan masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Berikut merupakan data yang memperlihatkan kondisi ketenagakerjaan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022.

Tabel 1. 1 Kondisi Ketenagakerjaan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 (Orang)

Tahun	Angkatan Kerja	Tenag kerja (Bekerja)	Pengangguran
2017	27.036.466	25.629.600	1.406.866
2018	28.628.334	27.166.672	1.461.662
2019	28.787.596	27.337.764	1.449.832
2020	29.476.031	27.665.526	1.810.505
2021	29.827.775	28.149.044	1.678.731
2022	30.486.119	28.849.415	1.636.704

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan tahun 2017-2022. Dapat dilihat bahwa angkatan kerja lebih tinggi daripada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan diikuti angka pengangguran yang menurun. Namun pada tahun 2020 jumlah angka pengangguran di Pulau Sumatera mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 24,88% atau sebesar 1.810.505 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 melambat karena adanya pandemi covid-19 sehingga banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan ketersediaan lapangan kerja turun signifikan. Jumlah tenaga kerja yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang diiringi turunnya angka pengangguran di Pulau Sumatera belum mampu dalam menyerap tenaga kerja karena rata-rata perkembangan pengangguran sebesar 3,64% masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata perkembangan tenaga kerja yang hanya 2,41%. Peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat akan mempengaruhi penambahan jumlah

angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada, akan memperbesar jumlah pengangguran. Berikut terdapat data jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1. 2 Jumlah Tenaga Kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera (Orang)

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	146.960	174.649	185.183	194.928	197.345	175.231
Sumatera Utara	574.570	687.491	662.386	655.552	682.605	720.482
Sumatera Barat	199.994	210.052	232.639	244.086	231.074	230.775
Riau	198.468	217.092	231.736	230.213	257.595	230.084
Jambi	74.317	85.318	93.625	87.520	83.099	94.420
Sumatera Selatan	279.370	578.353	539.411	524.583	565.604	565.834
Bengkulu	48.474	52.647	57.322	55.954	58.588	53.218
Lampung	605.893	659.987	756.375	670.282	690.275	668.876
Kep. Bangka Belitung	42.623	47.834	54.396	57.293	53.363	50.185
Kep. Riau	191.572	232.552	246.487	231.405	271.944	297.852
Pulau Sumatera	2.362.241	2.945.975	3.059.560	2.951.816	3.091.492	3.089.957

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera sebanyak 2.362.241 orang, kemudian pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja meningkat menjadi sebanyak 2.945.975 orang dengan peningkatan sebesar 24,71% dan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja meningkat menjadi sebanyak 3.059.560 orang dengan peningkatan sebesar 3,86%. Namun pada tahun 2020 jumlah tenaga kerja di Pulau Sumatera sebanyak 2.951.816 orang mengalami penurunan sebesar -3,52%. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,73% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.091.492 orang. Tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -0,15% dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.086.957. Apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja di provinsi-provinsi Pulau Sumatera tahun 2017-2022, jumlah tenaga kerja provinsi-provinsi di Pulau Sumatera cenderung mengalami penurunan dan hanya beberapa provinsi yang mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Adapun Provinsi Sumatera Utara

memiliki jumlah tenaga kerja yang tertinggi di Pulau Sumatera sebesar 720.482 orang. Kemudian, jumlah tenaga kerja terendah yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung yang juga mengalami penurunan dari 53.363 orang menjadi 50.185 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera belum terealisasi dengan baik karena penduduk yang bekerja pada sektor industri pengolahan cenderung mengalami penurunan.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu PDRB, investasi, dan upah minimum provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014).

Sektor industri pengolahan khususnya di Pulau Sumatera merupakan salah satu sektor yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar dalam perekonomian yang dapat dilihat dari Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera adalah sektor industri pengolahan. Perkembangan sektor industri pengolahan dinilai paling cepat dibandingkan dengan sektor lainnya. Bertambahnya jumlah industri pengolahan dapat membuka lapangan kerja baru yang menyebabkan meningkatnya pendapatan rumah tangga sehingga rumah tangga memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dengan adanya peningkatan jumlah industri pengolahan maka akan diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa PDRB sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya dan begitu juga secara provinsi. PDRB sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera pada tahun 2017 sebesar Rp.438.901,21 miliar, pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar

Rp.457.783,45 miliar atau sebesar 4,30%, tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.477.892,44 atau sebesar 4,39%, tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.479.137,57 miliar atau sebesar 0,26%, pada tahun 2021 sebesar Rp.496.415,81 miliar atau sebesar 3,61%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.514.089,93 atau sebesar 3,56%. PDRB sektor industri pengolahan tertinggi diperoleh oleh Provinsi Riau sebesar Rp.170.116,90 miliar. Sementara Provinsi Bengkulu memperoleh jumlah PDRB sektor industri pengolahan terendah di Pulau Sumatera dengan angka sebesar Rp.2.625,19 miliar. Namun, jika melihat dari sisi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di setiap provinsi yang sudah mengalami kenaikan maka dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di setiap provinsi sudah berkembang baik dan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan berbagai perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan investasi juga menentukan perkembangan ekonomi daerah. Karena dengan adanya investasi juga dapat mendorong perkembangan teknologi dalam meningkatkan kesempatan kerja yang baru. Peningkatan kegiatan investasi atau penanaman modal dalam negeri atau asing di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan kegiatan penanaman modal ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Awandari & Indrajaya, 2016). Semakin membaiknya investasi secara langsung memiliki dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, begitu pula pada tenaga kerja di Indonesia.

Investasi memiliki peran penting bagi setiap usaha untuk mengembangkan usahanya, karena investasi dapat memberi peluang bagi setiap pelaku ekonomi dalam memperluas usahanya serta memperbaiki sarana produksinya. Teori Keynes mengatakan bahwa cara mengurangi pengangguran yaitu dengan memperbanyak investasi. Misalnya alat-alat produksi seperti mesin akan membutuhkan operator dalam produksinya sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, besaran nilai investasi sektor industri pengolahan di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Investasi di Pulau Sumatera pada tahun 2017 sebesar Rp.53.997.399,6 miliar, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 44.760.119,5 miliar atau mengalami penurunan sebesar -17,1%, tetapi pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar Rp.50.433.525,6 miliar dengan peningkatan sebesar 12,67%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.68.397.462,5 miliar dengan peningkatan sebesar 35,61%, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp.51.865.545,3 miliar dengan penurunan sebesar -24,17% kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar Rp.79.432.770,2 dengan peningkatan sebesar 53,15%. Realisasi nilai investasi mengalami peningkatan karena investor masih percaya untuk menanamkan modal di Pulau Sumatera dan adanya peningkatan pelayanan sehingga menarik para investor. Adapun Provinsi dengan investasi tertinggi adalah provinsi Bengkulu sebesar 135,24% karena sumber daya alam yang melimpah dari sektor kelistrikan panas bumi dan adanya PLTU di Provinsi Bengkulu. Sedangkan provinsi dengan investasi terendah adalah Provinsi Sumatera Utara yang hanya sebesar -0,58% dikarenakan rendahnya efisiensi investasinya dan tingginya ICOR di Sumatera Utara sehingga para investor mengurungkan niatnya dalam berinvestasi. Investasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dalam jangka panjang yang dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya. Adapun investasi yang ada masih kurang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja karena para investor lebih tertarik berinvestasi yang bersifat padat modal atau teknologi dibandingkan padat karya.

Selain PDRB dan investasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) juga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Peningkatan UMP biasanya berdampak pada biaya produksi perusahaan yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja baru atau mempertahankan pekerja yang ada. Apabila nilai upah tinggi maka penawaran akan tenaga kerja semakin tinggi namun permintaannya akan menurun. Karena pengusaha yang tidak mampu membayar gaji yang tinggi sehingga memilih untuk mengurangi tenaga kerjanya. Apabila tingkat upah yang lebih rendah berarti lebih banyak tenaga kerja yang tersedia. Selama ini banyak terjadi masalah upah yang timbul karena perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Upah yang ditetapkan pada suatu wilayah akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain akan mempengaruhi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Semakin tinggi upah minimum yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi juga tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Adanya peningkatan upah dapat membuat biaya produksi juga meningkat, yang mengarah pada operasi perusahaan yang tidak efisien dan adanya kebijakan pengurangan pada tenaga kerja untuk mengurangi biaya produksi. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan menaikkan upah minimum akan berdampak pada jumlah tenaga kerja menjadi berkurang dan dengan demikian mengurangi jumlah untuk menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik diketahui bahwa upah minimum provinsi di Pulau Sumatera tahun 2017-2022 cenderung meningkat setiap tahunnya. Menurut data dari BPS, upah minimum provinsi terendah di Pulau Sumatera tahun 2022 adalah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.2.238.094 sedangkan sembilan provinsi lainnya memiliki tingkat upah yang lebih tinggi. Upah minimum provinsi tertinggi berada pada Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar Rp.3.264.884. Upah minimum provinsi yang meningkat

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Melalui peningkatan upah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kecenderungan penurunan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera dikarenakan dengan meningkatnya upah minimum maka produsen akan berusaha melakukan efisiensi untuk menutupi pembengkakan biaya produksi. Saat upah naik perusahaan kemungkinan besar akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Menurut (Sulistiawati, 2012) kurangnya akan lapangan kerja disebabkan oleh kenaikan upah minimum sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap menurun. Penyerapan tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat agar mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Penelitian mengenai pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja telah banyak dilakukan, namun penelitian ini masih penting dilakukan karena masih minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya angka pengangguran. Jika tingkat pengangguran meningkat akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tidak mendapat kehidupan layak yang akan memicu kepada kemiskinan. Peningkatan dan penurunan penyerapan tenaga kerja oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana perkembangan dan pengaruh penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera saat ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi dan upah minimum provinsi di Pulau Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, investasi, upah dan penyerapan tenaga di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis perkembangan PDRB sektor industri pengolahan, investasi, upah dan penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor industri pengolahan, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Sumatera tahun 2017-2022?

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis dan praktis. Adapun manfaat yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai bahan referensi serta acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah atau lembaga-lembaga yang lainnya dalam target dan kebijakan mengenai pemanfaatan ekonomi sumber daya manusia dalam mengembangkan pembangunan sektor industri terutama industri pengolahan.